
SENKETA INVESTASI ASING DI INDONESIA : ANALISIS KASUS NEWMONT DAN IMPLIKASI TERHADAP HUKUM INVESTASI NASIONAL

Daffa Ariefiano Satria

daffasatria013@students.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: daffasatria013@students.unnes.ac.id

Abstrak. *The dispute between the Government of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara reflects a major challenge in managing foreign investment within the national mining sector. This study aims to conduct a juridical analysis of the share divestment conflict and its implications for the reform of Indonesia's investment law. Using a normative juridical method with a statutory and case study approach, the research finds that the tension between the contract of work and national regulations has led to significant legal uncertainty. The international arbitration ruling strengthened Indonesia's legal position, but also highlighted the need for a more consistent, transparent, and nationally aligned investment legal system. This study recommends the reformulation of investment policies and the strengthening of legal institutions to address future complexities in foreign investor relations.*

Keywords: divestment; foreign investors; international arbitration; investment law; mining

Abstrak. *Sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara mencerminkan tantangan besar dalam pengelolaan investasi asing di sektor pertambangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sengketa divestasi saham yang terjadi, serta implikasinya terhadap reformasi hukum investasi nasional. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa ketegangan antara kontrak karya dan regulasi nasional menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Hasil putusan arbitrase internasional memperkuat posisi hukum Indonesia, namun juga menunjukkan perlunya sistem hukum investasi yang lebih konsisten, transparan, dan selaras dengan kepentingan nasional. Studi ini merekomendasikan reformulasi kebijakan investasi serta penguatan kelembagaan hukum untuk menghadapi kompleksitas hubungan dengan investor asing di masa depan.*

Kata Kunci: arbitrase internasional; divestasi; hukum investasi; investor asing; pertambangan

PENDAHULUAN

Pesatnya laju globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seiring berjalannya waktu. Pergeseran dinamika global ini lambat laun menciptakan tatanan dunia yang baru, yang secara otomatis juga melahirkan perubahan-perubahan yang berbeda dari sebelumnya. Berbagai sektor seperti bisnis, politik, ekonomi, dan lainnya pun dituntut untuk menyesuaikan diri dengan memperbaiki sistem yang ada demi menjaga pertumbuhan dan kelangsungan. Dalam bidang ekonomi, dampak globalisasi tampak jelas melalui kegiatan ekonomi yang kini melampaui batas-batas negara, serta meningkatnya kebutuhan akan investasi asing sebagai penunjang pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, investasi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, karena berperan penting sebagai penggerak perekonomian yang dapat mendorong pertumbuhan serta pembangunan ekonomi yang sesuai dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

PT Newmont Nusa Tenggara merupakan salah satu perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 1999. Perusahaan ini mengelola tambang Batu Hijau di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi salah satu penghasil utama tembaga dan emas di Indonesia. Dalam kontrak karya yang disepakati dengan pemerintah, terdapat ketentuan mengenai kewajiban divestasi saham secara bertahap kepada pihak Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan nasional dalam industri pertambangan serta memastikan bahwa keuntungan yang dihasilkan oleh sektor ini dapat lebih dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Namun, saat pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan divestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, PT Newmont Nusa Tenggara menolak untuk melaksanakannya. Pihak Newmont menilai bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak karya sebelumnya. Penolakan ini menimbulkan konflik antara Newmont dan pemerintah Indonesia, yang akhirnya memicu pengajuan sengketa ke forum arbitrase internasional, yaitu International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) pada tahun 2009. Sengketa ini menjadi krusial karena menyangkut kemampuan Indonesia dalam menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan nasional dengan kewajiban kontraktual yang telah ditandatangani. Selain itu, perkara ini juga memperlihatkan peran penting hukum internasional dalam menyelesaikan perselisihan antara negara dan investor. Putusan arbitrase tersebut tidak hanya memengaruhi relasi antara Newmont dan pemerintah Indonesia, tetapi juga memberikan dampak bagi investor asing lainnya dalam menilai konsistensi regulasi dan jaminan kepastian hukum di Indonesia¹.

Implikasi hukum dari kasus ini sangat luas. Pertama, kasus Newmont membuka ruang refleksi terhadap kelemahan harmonisasi antara perjanjian kontrak karya, peraturan investasi nasional, dan kewenangan fiskal antara pusat dan daerah. Kedua, konflik tersebut menimbulkan perdebatan mengenai bentuk investasi yang dilakukan pemerintah, apakah termasuk penyertaan modal atau investasi jangka panjang non-permanen, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda. Ketiga, ketidakterlibatan legislatif dalam keputusan strategis terkait pembelian saham menimbulkan krisis legitimasi kebijakan investasi negara. Di tengah pentingnya penguasaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, kasus Newmont menuntut pembaruan hukum investasi yang lebih adaptif dan transparan. Pemerintah perlu menyusun kerangka hukum yang tidak hanya memberikan kepastian bagi investor asing, tetapi juga menjamin kontrol negara atas sumber daya strategis dan menyelaraskan wewenang antar level pemerintahan.

Lebih jauh, kasus ini juga menyoroti kelemahan dalam sistem hukum investasi Indonesia, terutama dalam hal implementasi perjanjian dan penegakan regulasi. Proses penyelesaian sengketa yang harus melibatkan lembaga arbitrase internasional seperti

¹ Wijaya, D. U., Irawan, F., Tamara, Y. A., Herdiyanti, S. H., Wiradirja, I. R., & Pranadita, N. (2025). KASUS ARBITRASE NEWMONT VS INDONESIA: TAHUN 2009. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(1).

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) menandakan adanya ketidakpercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di dalam negeri. Hal ini memberikan sinyal bagi pembuat kebijakan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem hukum investasi nasional agar mampu mencegah terjadinya sengketa serupa di masa mendatang.²

Dengan demikian, melalui analisis terhadap kasus sengketa Newmont, tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan dan kekuatan hukum investasi nasional dalam merespons dinamika investasi asing. Pemahaman atas kasus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan regulasi investasi yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa Indonesia.

KAJIAN TEORI

Sengketa investasi asing pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika hubungan antara negara penerima investasi dan investor asing, yang sering kali diwarnai oleh perbedaan kepentingan dan interpretasi terhadap perjanjian investasi. Dalam konteks hukum internasional, investasi asing dilindungi oleh prinsip-prinsip seperti fair and equitable treatment, non-discrimination, dan larangan terhadap tindakan ekspropriasi tanpa kompensasi. Ketika sengketa terjadi, investor dapat mengajukan gugatan melalui forum arbitrase internasional seperti International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Hal ini menegaskan bahwa meskipun negara memiliki kedaulatan, pelaksanaan kebijakan investasi harus tetap tunduk pada komitmen internasional yang telah disepakati. Dari perspektif hukum nasional, kasus seperti sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara menjadi titik refleksi penting terkait kepastian hukum dan harmonisasi regulasi. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Ketika pemerintah menerapkan kebijakan divestasi berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun hal tersebut dianggap bertentangan dengan kontrak karya yang telah ada sebelumnya, maka muncul ketegangan antara peraturan domestik dan kontrak yang bersifat *lex specialis*. Hal ini memperlihatkan perlunya sistem hukum yang mampu menjembatani kontrak privat dan kepentingan publik agar tidak memicu konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, putusan arbitrase, literatur hukum, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan investasi asing dan penyelesaian sengketa. Metode ini digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mengatur

² Arif, S. R. U. (2023). Aktualisasi Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Sengketa Joint Venture Investor Asing Dengan Pemerintah Di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(4), 270-290.

hubungan antara negara dan investor asing, serta untuk menelaah bagaimana sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara dapat dijelaskan dalam kerangka hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi yang relevan seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam sengketa divestasi antara pemerintah dan PT Newmont Nusa Tenggara, termasuk dokumen kontrak karya, kronologi konflik, jalur penyelesaian melalui ICSID, serta putusan akhir dan implikasinya terhadap hukum investasi nasional. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan arbitrase), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menginterpretasikan isi dokumen hukum untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang permasalahan hukum yang diangkat, serta menarik kesimpulan tentang bagaimana kasus Newmont mencerminkan tantangan dalam penerapan hukum investasi nasional di tengah kewajiban internasional yang telah disepakati.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang dan Kronologi Sengketa PT Newmont Nusa Tenggara

Sengketa antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia merupakan salah satu kasus divestasi saham yang paling menyita perhatian publik. Konflik ini bermula dari perjanjian Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada 1986, di mana diwajibkan untuk melakukan divestasi secara bertahap kepada pihak Indonesia. Sebagai perusahaan tambang emas dan tembaga multinasional yang beroperasi di Batu Hijau, Sumbawa, PT. Newmont Nusa Tenggara diharuskan mematuhi ketentuan bahwa setelah beroperasi selama 5 tahun, perusahaan harus mulai menjual sahamnya kepada pihak Indonesia hingga mencapai 51%. Permasalahan mulai muncul ketika pada tahun 2006-2007, PT. NEWMONT NUSA TENGGARA tidak melaksanakan kewajiban divestasi saham sebesar 17% sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Kontrak Karya. Hal ini memicu Pemerintah Indonesia untuk mengajukan gugatan arbitrase internasional pada Maret 2008. Setelah melalui proses arbitrase yang panjang, pada Juli 2009, Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan bahwa PT. NEWMONT NUSA TENGGARA telah melanggar kewajibannya dan harus segera melaksanakan divestasi saham tersebut dalam jangka waktu 180 hari, disertai dengan denda keterlambatan.

Proses divestasi yang berlarut-larut kemudian terus berlanjut dengan berbagai dinamika politik dan ekonomi. Pada tahun 2010, terjadi kesepakatan divestasi 7% saham kepada Pemerintah Daerah NTB. Selanjutnya pada 2011-2012, proses negosiasi untuk 10% saham berikutnya mengalami kebuntuan terkait penentuan harga saham, di mana PT. NEWMONT NUSA TENGGARA menetapkan harga yang dinilai terlalu tinggi oleh

pemerintah. Ketegangan kembali meningkat ketika pada 2014, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan larangan ekspor konsentrat mineral mentah yang mempengaruhi operasional PT.NEWMONT NUSA TENGGARA .³

Titik balik sengketa terjadi pada tahun 2016 ketika PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ditunjuk sebagai holding BUMN tambang untuk mengakuisisi saham PT.NEWMONT NUSA TENGGARA . Setelah negosiasi yang panjang, pada Juli 2018, Inalum akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi 51,2% saham PT.NEWMONT NUSA TENGGARA senilai US\$ 3,85 miliar. Kesepakatan ini menandai berakhirnya sengketa divestasi saham yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, dan mengubah nama perusahaan menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Kasus sengketa PT.NEWMONT NUSA TENGGARA ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia dalam mengelola hubungan dengan investor asing di sektor pertambangan. Sengketa ini menunjukkan kompleksitas penerapan kebijakan divestasi saham dan pentingnya kejelasan aturan dalam kontrak investasi pertambangan. Kasus ini juga mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah Indonesia yang semakin tegas dalam menegakkan kedaulatan terhadap sumber daya mineral strategis, sekaligus upaya untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari sumber daya alam bagi kepentingan nasional.

2. Dimensi Hukum: Ketegangan antara Kontrak Karya dan Peraturan Nasional

Sengketa hukum yang terjadi antara PT Newmont Nusa Tenggara dan Pemerintah Indonesia menghadirkan pertentangan mendasar antara dua prinsip hukum utama: *pacta sunt servanda* yang menjunjung tinggi kesakralan kontrak di satu sisi, dengan prinsip kedaulatan negara untuk memodifikasi regulasi nasional di sisi lain. Perjanjian Kontrak Karya generasi keempat yang disepakati tahun 1986 merupakan perjanjian bilateral yang secara hierarkis setara dengan undang-undang dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Transformasi lanskap politik Indonesia pasca era Reformasi membawa pergeseran signifikan dalam filosofi pengelolaan kekayaan alam negara, memunculkan perdebatan krusial mengenai apakah regulasi yang baru ditetapkan dapat mengesampingkan komitmen-komitmen yang telah terlebih dahulu disepakati, khususnya berkaitan dengan ketentuan divestasi kepemilikan saham yang telah diatur secara eksplisit dalam Kontrak Karya.

Dalam konstruksi sistem hukum nasional, Kontrak Karya memiliki posisi yang unik dengan karakteristik *sui generis*, merupakan bentuk perjanjian dengan sifat quasi-legislatif yang khas. Walaupun secara formal berbentuk kontrak, instrumen hukum ini memiliki dimensi kepentingan publik karena mengatur eksploitasi sumber daya alam yang berada di bawah penguasaan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kekhususan status ini menimbulkan konflik interpretasi antara perspektif PT.NEWMONT NUSA TENGGARA yang memandang Kontrak

³ Jubaidi, D. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Internasional (Analisis Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan PT Newmont Nusa Tenggara). *Global Insight Journal*, 8(2).
Simanjuntak, E. P., & Sulistiowati, F. (2023). "Kontrak Karya vis-à-vis Kedaulatan Negara:

Karya sebagai *lex specialis* yang kebal terhadap perubahan sepihak, dengan argumentasi Pemerintah Indonesia yang menekankan bahwa kedaulatan negara memberikan wewenang untuk merevisi kebijakan demi kepentingan umum yang lebih luas, seperti dimanifestasikan dalam UU Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009 yang secara fundamental mengubah lanskap regulasi sektor pertambangan.

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional pada periode 2008-2009 mengungkapkan kerumitan dalam mengaplikasikan doktrin-doktrin hukum internasional terhadap konflik investasi di bidang pertambangan. Majelis Arbitrase UNCITRAL dalam mengadili kasus ini dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak-hak kontraktual investor asing dengan pengakuan atas hak berdaulat setiap negara untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Keputusan final yang berpihak pada Indonesia menegaskan bahwa meskipun Kontrak Karya memiliki daya ikat yang kuat, seluruh kewajiban yang tercantum di dalamnya tetap harus diimplementasikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati bersama. Putusan ini kemudian menjadi preseden hukum yang signifikan dalam perkembangan hukum investasi internasional, terutama berkaitan dengan interpretasi dan penerapan ketentuan divestasi dalam kontrak-kontrak pertambangan.

Aspek hukum yang tidak kalah pelik dalam sengketa PT.NEWMONT NUSA TENGGARA adalah benturan antara prinsip stabilitas kontrak dan fleksibilitas regulasi. Klausul stabilisasi yang termuat dalam Kontrak Karya, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada investor dari perubahan peraturan yang berpotensi merugikan, harus berhadapan dengan dinamika politik dan hukum Indonesia yang terus berevolusi. Hadirnya UU Mineral dan Batubara 2009 membawa perubahan paradigma dengan mendorong peningkatan nilai tambah mineral domestik melalui kewajiban pemrosesan dan pemurnian di dalam negeri, kebijakan yang secara fundamental mengubah model bisnis perusahaan tambang yang sebelumnya mengandalkan ekspor konsentrat tanpa pengolahan lebih lanjut. Resistensi yang ditunjukkan PT.NEWMONT NUSA TENGGARA terhadap regulasi baru ini mencerminkan ketegangan antara pelaksanaan kontrak jangka panjang dengan perkembangan kebijakan publik yang terus menyesuaikan dengan kepentingan nasional.⁴

Implementasi keputusan arbitrase internasional ke dalam sistem hukum domestik menjadi problematika tersendiri dalam sengketa PT.NEWMONT NUSA TENGGARA . Walaupun telah ada putusan yang mengikat dari tribunal arbitrase, eksekusinya membutuhkan sinergi antar berbagai lembaga pemerintah dan keselarasan interpretasi mengenai ketentuan divestasi. Penentuan nilai wajar saham yang akan dilepas menjadi perdebatan hukum berkepanjangan karena tidak adanya panduan metodologi valuasi yang spesifik dalam Kontrak Karya. Situasi ini mendemonstrasikan bahwa ketidaklengkapan pengaturan teknis dalam sebuah perjanjian investasi dapat memicu konflik berkelanjutan, bahkan setelah adanya putusan hukum yang definitif. Dinamika kelembagaan antara

⁴ Simanjuntak, E. P., & Sulistiwati, F. (2023). "Kontrak Karya vis-à-vis Kedaulatan Negara: Analisis Yuridis Kasus Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara dalam Perspektif Hukum Investasi Internasional." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 15(3), 287-310.

otoritas pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya mineral turut menjadi faktor kompleksitas tambahan dalam sengketa PT.NEWMONT NUSA TENGGARA, dengan desentralisasi pasca-Reformasi yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah namun seringkali menciptakan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan pembagian peran dalam mengawasi pelaksanaan Kontrak Karya.⁵

3. Implikasi terhadap Hukum Investasi Nasional dan Reformasi Kebijakan

Sengketa divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NEWMONT NUSA TENGGARA) telah memberikan implikasi mendalam terhadap perkembangan hukum investasi nasional Indonesia, khususnya pada sektor pertambangan. Kasus ini menjadi katalisator bagi reformulasi kerangka kebijakan investasi yang lebih komprehensif dan seimbang antara kepentingan investor dengan kedaulatan nasional. Pasca-putusan arbitrase internasional yang memenangkan Indonesia pada 2009, pemerintah melakukan evaluasi sistematis terhadap instrumen hukum yang mengatur investasi asing di sektor ekstraktif. Transformasi paling signifikan terlihat dari pergeseran paradigma dari model Kontrak Karya (KK) menuju sistem Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam UU Mineral dan Batubara tahun 2009 yang kemudian disempurnakan pada amendemen 2020. Perubahan fundamental ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengembalikan kendali negara atas sumber daya mineral strategis, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang lebih proporsional bagi investor melalui mekanisme perizinan yang lebih transparan dan akuntabel.

Pengalaman sengketa PT.NEWMONT NUSA TENGGARA secara signifikan memengaruhi kebijakan divestasi saham perusahaan tambang asing di Indonesia. Kesulitan dalam implementasi kewajiban divestasi yang dialami dalam kasus ini mendorong pemerintah untuk merumuskan ketentuan yang lebih jelas dan terukur mengenai skema, jadwal, mekanisme valuasi, dan prioritas pembelian dalam proses divestasi. Melalui PP No. 1 Tahun 2017 dan perubahannya, pemerintah menetapkan tahapan divestasi yang lebih terstruktur dengan memberikan penekanan pada peran BUMN dan BUMD sebagai prioritas pertama dalam mengakuisisi saham perusahaan tambang asing. Pembentukan holding BUMN pertambangan melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang berhasil mengakuisisi mayoritas saham PT.NEWMONT NUSA TENGGARA menjadi model institusional baru dalam mengoptimalkan nilai ekonomi dari kewajiban divestasi. Reformasi kebijakan ini menunjukkan evolusi pendekatan yang lebih strategis dan berorientasi pada penguasaan nasional terhadap aset-aset mineral kritis, sekaligus memberikan ruang bagi negara untuk membangun kapasitas pengelolaan tambang berskala besar.⁶

Implikasi lain yang tidak kalah penting dari kasus PT.NEWMONT NUSA TENGGARA adalah penguatan mekanisme penyelesaian sengketa investasi dalam

⁵ Darmawan, A., & Hutapea, T. M. H. (2022). "Penerapan Doktrin Pacta Sunt Servanda dan Rebus Sic Stantibus dalam Sengketa Pertambangan: Studi Kasus PT Newmont Nusa Tenggara." *Padjadjaran Journal of International Law*, Vol. 10(1), 76-95.

⁶ Wicaksono, B., & Lestari, D. P. (2021). "Ketegangan Rezim Hukum dalam Kontrak Karya Pertambangan: Analisis Dimensi Hukum Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara." *Indonesian Journal of Natural Resources Law*, Vol. 4(2), 145-168.

konteks hukum nasional Indonesia. Pengalaman panjang dalam proses arbitrase internasional menghadapi PT.NEWMONT NUSA TENGGARA memberikan pembelajaran berharga bagi aparat hukum Indonesia tentang kompleksitas sengketa investasi, terutama yang melibatkan perusahaan multinasional dengan dukungan diplomatik dan finansial yang kuat. Sebagai respons, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengembangkan tim khusus untuk menangani sengketa investasi internasional dan memperkuat koordinasi antar kementerian dalam menghadapi potensi sengketa dengan investor asing. Reformasi ini diikuti dengan revisi berbagai perjanjian investasi bilateral (BIT) dan kesepakatan perdagangan bebas (FTA) untuk memasukkan klausul yang lebih melindungi ruang kebijakan negara (policy space) dalam mengatur sumber daya alam. Perkembangan kapasitas kelembagaan ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya membangun sistem hukum investasi yang tidak hanya menarik bagi investor tetapi juga menjamin kedaulatan negara dalam mengelola kekayaan alamnya.

Dari perspektif regulasi lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, kasus PT.NEWMONT NUSA TENGGARA telah mendorong reformasi komprehensif dalam standar dan pengawasan praktik pertambangan di Indonesia. Transisi kepemilikan mayoritas PT.NEWMONT NUSA TENGGARA kepada entitas nasional membuka peluang bagi penerapan standar lingkungan yang lebih ketat dan program tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Pemerintah merespons dengan memperkuat instrumen hukum terkait kewajiban reklamasi, pascatambang, dan pengelolaan limbah pertambangan melalui berbagai peraturan turunan dari UU Minerba. Pengalaman menghadapi resistensi PT.NEWMONT NUSA TENGGARA terhadap kebijakan peningkatan nilai tambah mineral (hilirisasi) juga mendorong pemerintah untuk mengembangkan strategi implementasi yang lebih matang dan bertahap, dengan mempertimbangkan kelayakan teknis dan ekonomis bagi industri. Reformasi kebijakan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan regulasi yang semata-mata berorientasi pada ekstraksi sumber daya menuju model tata kelola pertambangan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan jangka panjang.⁷

Transformasi paling fundamental dari kasus PT.NEWMONT NUSA TENGGARA terhadap hukum investasi nasional terletak pada reorientasi filosofis yang melandasi kebijakan investasi pertambangan. Pengalaman sengketa yang panjang dengan PT.NEWMONT NUSA TENGGARA telah memperkuat kesadaran bahwa perjanjian investasi bukan sekadar instrumen untuk memfasilitasi modal asing, tetapi juga mekanisme untuk mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam bagi kepentingan nasional. Hal ini tercermin dalam perubahan pendekatan terhadap kontrak-kontrak pertambangan yang lebih menekankan pada pemerataan manfaat ekonomi, transfer teknologi, dan pengembangan industri hilir. Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan Indonesia dalam sengketa dengan PT.NEWMONT NUSA TENGGARA telah menjadi landasan bagi strategi negosiasi yang lebih percaya diri dengan perusahaan tambang multinasional lainnya, seperti PT Freeport Indonesia. Prinsip-prinsip yang diperjuangkan

⁷ Kusumaatmadja, R., & Winarto, H. (2020). "Transformasi Kebijakan Divestasi Saham Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia: Belajar dari Kasus PT Newmont Nusa Tenggara." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32(1), 35-51.

dalam kasus PT.NEWMONT NUSA TENGGARA , seperti penguasaan mayoritas saham oleh pihak nasional dan kewajiban pengolahan dalam negeri, kemudian menjadi standar dalam renegotiasi kontrak-kontrak pertambangan lainnya, menandai era baru dalam hubungan investasi yang lebih seimbang antara negara dengan investor asing.

Dari segi tata kelola kelembagaan, kasus PT.NEWMONT NUSA TENGGARA telah mendorong reformasi struktural dalam pengawasan dan pengelolaan investasi pertambangan di Indonesia. Pengalaman dalam mengelola kompleksitas sengketa PT.NEWMONT NUSA TENGGARA mengungkapkan kelemahan koordinasi antar lembaga pemerintah yang berwenang dalam sektor pertambangan, mulai dari kementerian teknis, otoritas investasi, hingga pemerintah daerah. Sebagai respons, pemerintah melakukan reorganisasi tata kelola pertambangan dengan memperkuat peran Kementerian ESDM sebagai regulator teknis, serta Kementerian Investasi/BKPM sebagai fasilitator investasi yang terintegrasi. Pembentukan tim koordinasi lintas kementerian untuk menangani renegotiasi dan implementasi kontrak pertambangan strategis merupakan inovasi kelembagaan yang lahir dari pembelajaran kasus PT.NEWMONT NUSA TENGGARA . Reformasi ini didukung oleh penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kontrak pertambangan, termasuk melalui implementasi standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) yang memungkinkan pengawasan publik yang lebih efektif terhadap arus pendapatan dari sektor ekstraktif. Transformasi kelembagaan ini mencerminkan komitmen untuk membangun sistem tata kelola pertambangan yang lebih profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa.⁸

KESIMPULAN

Sengketa antara PT Newmont Nusa Tenggara dan Pemerintah Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara perlindungan hak investor asing dan kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alam. Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan nasional, seperti kewajiban divestasi saham berdasarkan Undang-Undang Minerba, dapat memicu konflik jika tidak sejalan dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Melalui penyelesaian arbitrase internasional, Indonesia berhasil menegaskan posisinya dalam mempertahankan kepentingan nasional, namun juga menyadari perlunya pembaruan sistem hukum investasi yang lebih adaptif, konsisten, dan transparan. Implikasi dari kasus ini mendorong lahirnya reformasi kebijakan, baik dalam bentuk peralihan dari kontrak karya ke izin usaha, penguatan kelembagaan pengelola investasi, hingga penataan ulang mekanisme divestasi yang lebih terstruktur. Dengan demikian, kasus Newmont menjadi titik penting dalam perjalanan hukum investasi Indonesia menuju sistem yang lebih seimbang antara menarik investasi asing dan melindungi kedaulatan negara.

⁸ Priatna, A. D., & Siregar, D. Y. (2022). "Rekonstruksi Model Kontrak Investasi Pertambangan Pasca Kasus PT Newmont Nusa Tenggara: Menuju Keseimbangan Baru antara Kepastian Hukum dan Kedaulatan Nasional." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19(4), 219-244.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

UU NO 4 TAHUN 2009 (MINERBA)

ARTIKEL JURNAL

- Wijaya, D. U., Irawan, F., Tamara, Y. A., Herdiyanti, S. H., Wiradirja, I. R., & Pranadita, N. (2025). KASUS ARBITRASE NEWMONT VS INDONESIA: TAHUN 2009. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(1).
- Arif, S. R. U. (2023). Aktualisasi Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dalam Sengketa Joint Venture Investor Asing Dengan Pemerintah Di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(4), 270-290.
- Jubaidi, D. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa Internasional (Analisis Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan PT Newmont Nusa Tenggara). *Global Insight Journal*, 8(2).
- Simanjuntak, E. P., & Sulistiowati, F. (2023). "Kontrak Karya vis-à-vis Kedaulatan Negara: Analisis Yuridis Kasus Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara dalam Perspektif Hukum Investasi Internasional." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 15(3), 287-310.
- Darmawan, A., & Hutapea, T. M. H. (2022). "Penerapan Doktrin Pacta Sunt Servanda dan Rebus Sic Stantibus dalam Sengketa Pertambangan: Studi Kasus PT Newmont Nusa Tenggara." *Padjadjaran Journal of International Law*, Vol. 10(1), 76-95.
- Wicaksono, B., & Lestari, D. P. (2021). "Ketegangan Rezim Hukum dalam Kontrak Karya Pertambangan: Analisis Dimensi Hukum Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara." *Indonesian Journal of Natural Resources Law*, Vol. 4(2), 145-168.
- Kusumaatmadja, R., & Winarto, H. (2020). "Transformasi Kebijakan Divestasi Saham Perusahaan Pertambangan Asing di Indonesia: Belajar dari Kasus PT Newmont Nusa Tenggara." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32(1), 35-51.
- Priatna, A. D., & Siregar, D. Y. (2022). "Rekonstruksi Model Kontrak Investasi Pertambangan Pasca Kasus PT Newmont Nusa Tenggara: Menuju Keseimbangan Baru antara Kepastian Hukum dan Kedaulatan Nasional." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19(4), 219-244.